

3 Capim Dinilai Masih Bermasalah

[JAKARTA] Koordinator Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri menyatakan Panitia Seleksi (pansel) Capim KPK masih meloloskan dan mengajukan tiga nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bercatat negatif ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). ICW mempertanyakan alasan dan paparan terbuka soal penilaian yang membuat ketiga nama tersebut melenggang ke tangan presiden.

"Ada yang kekayaannya tak wajar dan ada yang pengalamannya tak sejalan dengan pemberantasan korupsi. Kenapa mereka masih lolos," katanya, saat dihubungi *SP*, Rabu (2/9).

ICW berkekuah tak mau menyebut identitas tiga calon pimpinan yang diklaim bercatat negatif. Febri hanya menyatakan salah satu calon bermasalah dalam penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara. Calon yang berasal dari salah satu lembaga negara ini memiliki harta yang tak sesuai dengan profil dan nominal gaji. "Kekayaannya bisa dibilang lebih banyak dari atasannya," kata Febri.

Calon yang lain, menurut ICW, memiliki visi dan misi yang justru mengesampingkan

si penindakan dan menyebabkan kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Calon ini secara gamblang menyebut KPK seharusnya hanya jadi trigger mechanism bagi Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Perannya tak lebih sebagai penerima laporan kasus korupsi.

"Calon ini akan diam saat KPK dilemahkan melalui revisi undang-undang," kata Febri.

Calon terakhir yang bermasalah berasal dari latar belakang hakim tindak pidana korupsi. Calon ini pernah mengeluarkan disenting opinion dalam empat putusan kasus korupsi besar. ICW menilai, hakim ini tak sepaham soal pemberantasan korupsi. Di tingkat yang lebih tinggi, Mahkamah Agung justru menguatkan putusan hakim yang lain.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Hifdzil Alim juga menilai keputusan pansel meloloskan delapan nama ke presiden meninggalkan catatan khusus. Ia mempertanyakan soal masih lolosnya calon yang berlatar belakang kepolisian. Hal ini dinilai sebagai langkah kompromi pansel terhadap bayang-bayang harus adanya perwakilan dari kepolisian atau kejaksaan.



ANTARA/HAFIDZ MUBARAK

Mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan didampingi Wakil Ketua KPK Zulkarnain (kiri), usai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (1/9). KPK mengundang Kuntoro untuk berdiskusi tentang rencana strategis KPK periode mendatang.

Pansel seharusnya justru menyelamatkan KPK dari kemungkinan adanya titipan lembaga, politik atau kekuatan ekonomi tertentu. "Menurut saya ini (hasil Pansel) kurang sehat," kata Hifdzil.

Pakar hukum Frans Hendra Winarta mengaku khawatir, keberadaan KPK ke depan bakal jadi Komisi Pencegahan Korupsi bukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Pasalnya, 8 calon

pimpinan (capim) KPK yang telah dikantongi presiden bukan sosok petarung. "Semoga tidak karena mencegah saja tidak cukup karena koruptor tidak akan takut dan ngeri. Hanya dengan penghukuman dan perampasan aset mereka ngeri. Lihat saja sekarang korupsi jalan terus dan mereka melawan di pengadilan sambil cengengesan dan tertawatawa, tidak ada penyesalan sama sekali seolah-olah korupsi itu lumrah," kata Frans, kepada *SP*, di Jakarta,

Rabu (2/9).

Dikatakan, kekhawatiran itu muncul karena 8 sosok yang diserahkan pansel kepada Presiden Jokowi, Selasa (1/9), mayoritas bukan sosok yang memahami KUHAP maupun UU Tipikor dan UU KPK. Namun, pansel telah membaginya dalam bidang penindakan, pencegahan, manajemen, serta supervisi, koordinasi, dan monitoring.

"Saya khawatir mereka tidak cocok untuk pekerjaan di KPK yang sarat hukum pidana dan hukum acara. Disiplin ilmu mereka kebanyakan cocok untuk manajemen perusahaan dan instansi pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, keberadaan KPK yang diharapkan mampu menyentuh sektor-sektor korupsi yang sulit dibongkar sekaligus men-trigger Kepolisian dan Kejaksaan bakal sulit diharapkan kalau figur pimpinannya minim keahlian investigasi dan interogasi selain menguasai KUHAP.

"Ini lembaga antikorupsi bukan lembaga pendidikan atau keilmuan. Jadi harus sebagian besar punya latar belakang penegakan hukum praktis, juga dibutuhkan penegak hukum yang dewasa dan tidak ada ambisi politik hanya tahu perang lawan

korupsi dan petarung sejati," tegasnya.

Siap Seleksi

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, Komisi bidang Hukum itu siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) calon pimpinan KPK yang kini sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo. DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK dalam waktu 14 hari setelah resmi diajukan Presiden.

"Begitu diajukan (Presiden), Komisi III siap lakukan uji kepatutan dan kelayakan. Presiden juga kan punya waktu 14 hari mengajukan ke DPR. DPR juga 14 hari," ujar Masinton kepada *SP* di Jakarta, Selasa (1/9).

Masinton berharap, pimpinan terpilih nanti mampu membawa KPK ke arah lebih baik. KPK diharapkan mampu meningkatkan fungsi pencegahan dibanding penindakan.

Selain itu, lanjut dia, selama 4 tahun ke depan jangan ada kegaduhan-kegaduhan di antara sesama penegak hukum. Bahkan, KPK harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

[MJS/YUS/E-11/F-5/H-14]